



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHRURROZI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
3. NHK : 834398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/400 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/124 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 686 m²/686 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 4160 m²/4160 m² di KAB / KOTA OKU SELATAN, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 381.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV CITY CAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV S Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 850.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.316.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.316.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.